

## BAB V

### KESIMPULAN

Dibawah Kepemimpinan Koalisi Liberal pada tahun 2013, Australia membuat kebijakan untuk memangkas ODA sebagai upaya penghematan Anggaran Federal. Indonesia merupakan Negara yang harus terkena dampak pemangkasan bantuan terbesar oleh Australia. Hal tersebut adalah langkah yang diambil untuk menyelamatkan keadaan ekonomi Australia di masa mendatang. Pemerintah Australia mengambil kebijakan untuk memberikan wewenang program bantuan luar negeri ke DFAT yang menghasilkan perombakan yang menghasilkan “paradigma baru bantuan Australia”. Dibawah naungan DFAT, tujuan bantuan Australia dirubah dengan memprioritaskan *nasional interest* terlebih dahulu baru sumbangasihnya terhadap pengentasan kemiskinan dan perdamaian dunia.

Australia merubah startegi prioritasnya dan membuat kebijakan baru bantaun yang dipromosikan sebagai “*New Aid Paradigm*” dengan mengubah prinsip ODA menjadi “investasi” untuk medapatkan keuntungan jangka panjang dari Wilayah Indo-Pasifik. Menyadari perkembangan ekonomi yang pesat terhadap negara-negara di kawasan Asia terutama Indonesia, Australia mengalihkan diplomasi budaya melalui ODA dirubah menjadi diplomasi ekonomi dengan bertumpu pada komitmen “*aid for trade*”. Hal tersebut tertuang jelas secara transparan dalam *Australia Foreign Policy White Paper 2017* dimana Australia menggunakan pendekatan investasi dan perdagangan dalam seluruh aspek kebijakan luar negerinya. Berbagai program bantuan dan kerjasama Australia dengan pemerintah Indonesia mengalami berbagai pergantian dengan menyesuaikan system baru yang diberlakukan oleh Pemerintah Australia.

